

Meningkatkan Kesadaran Pemerintah Desa dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma

Raising Awareness of the Village Government on the Implementation of Minimum Service Standards in the Village of Cahaya Negeri, Sukaraja Sub-district, Seluma Regency

Abdul Aziz Zuhakim^{1*}

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38122 - Indonesia

*E-mail corresponding author: abdul.azizzuhakim@unib.ac.id

Received: 12 Juli 2024; Revised: 11 Januari 2025; Accepted: 21 Februari 2025; Available Online: 28 Februari 2025

Abstrak. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang harus diwujudkan hingga tingkat desa. Namun, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dalam menerapkan SPM Desa. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif dan pendampingan dalam penyusunan alur pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan dalam perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, ditemukan bahwa peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan SPM Desa sangat penting, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan desa. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan berkelanjutan diperlukan agar aparatur desa mampu menerapkan SPM Desa secara optimal. Dengan demikian, kesadaran yang meningkat diharapkan dapat mendorong perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik di desa. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan terstruktur dan berkelanjutan dalam membangun tata kelola desa yang lebih baik.

Kata Kunci: pemerintah desa; pelayanan publik; standar pelayanan minimal desa.

Abstract. Quality public services are part of a bureaucratic reform that needs to be implemented down to the village level. However, the limited understanding of village officials about the Village Minimum Service Standards (SPM Desa) is a major challenge in implementing this policy. This community service activity aims to increase the awareness and understanding of village officials in Cahaya Negeri, Sukaraja District, Seluma Regency, in implementing the Village Minimum Service Standards. The methods used included socialization, interactive discussions and assistance preparing the public service flow. The results of the activity showed a significant increase in the understanding of the participants, as shown by the comparison of the pre-and post-test results. In addition, it was found that the active role of the government and the community in monitoring the implementation of the Village Minimum Service Standards is very important to increase the transparency and accountability of village services. The conclusion of this activity emphasizes the need for ongoing training and support to enable village officials to best implement the Village Minimum Service Standards. In this way, it is hoped that increased awareness can bring about real change in the quality of village public services. This activity highlights the importance of a structured and continuous approach to building better village governance.

Keywords: public services; village governance; village minimum service standards.

DOI: <https://doi.org/10.30653/jppm.v10i1.1016>



1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan berkualitas, transparan, dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan dasar serta hak setiap warga negara melalui penyediaan barang, jasa dan pelayanan administratif. Selanjutnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia (Sawir, 2020). Namun, realitas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan berbagai tantangan, mulai dari sistem pemerintahan yang belum efektif hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur (Djani, 2022). Kondisi ini semakin kompleks ditingkat desa, dimana sebagai ujung tombak pelayanan, pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat meski berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Monoarfa, 2012), yang menekankan pentingnya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan warga mendapatkan pelayanan sesuai harapan.

Desa Cahaya Negeri yang terletak di kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma, menghadapi permasalahan klasik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Merujuk pada Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, dengan dimaksudkan untuk menciptakan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*. SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa, yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Namun dalam implementasinya, keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai SPM Desa, minimnya infrastruktur teknologi pendukung, serta belum optimalnya sistem dokumentasi dan pengarsipan menjadi hambatan utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. (Surpto, 2014) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh daya tanggap, kredibilitas, dan empati, dengan kedisiplinan, ketersediaan, dan keterampilan petugas memainkan peran kunci.

Urgensi penerapan SPM Desa Cahaya Negeri tidak hanya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan praktik-praktik mal-administrasi dan potensi korupsi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Baru et al., 2019), yang mengindikasikan bahwa buruknya kualitas pelayanan publik dapat menjadi pintu masuk bagi praktik-pratik korupsi di birokrasi. (Sadik, 2022) memperkuat argument ini dengan menyatakan bahwa pelayanan publik yang prima harus memfokuskan pada pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, desa Cahaya Negeri memiliki potensi yang besar untuk pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih baik, sebagaimana dikemukakan oleh (Jing, 2007), bahwasannya meningkatkan layanan publik di pedesaan sangat penting untuk mencapai keadilan dan keharmonisan sosial di masyarakat, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kota dan desa.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran dan pemahaman yang komprehensif di kalangan aparatur desa mengenai pentingnya penerapan SPM Desa. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek edukasi regulasi dan prosedur, tetapi juga juga menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk memastikan standar tersebut dipenuhi, karena penerapan SPM Desa memerlukan mekanisme audit dan evaluasi yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan pendapat (Hidayat et al., 2022) bahwa teknik audit sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa, dengan cara mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Kebaruan program dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan edukasi, pendampingan praktis, dan pembangunan sistem

pemantauan berbasis teknologi, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik desa Cahaya Negeri.

2. METODE

Penerapan standar pelayanan minimal atau SPM Desa merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terukur dalam konteks administrasi publik. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, langkah pertama yang esensial adalah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan kapasitas dari pemerintah desa Cahaya Negeri. Analisis ini melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap pelayanan publik melalui praktik penerapan standar pelayanan minimal sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Pelaksanaan kegiatan ini mengadopsi konsep *participatory learning and action* (Theresia dalam Hasanah & Saruri, 2018). Pendekatan ini dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan pemerintah desa, serta dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan teknis penerapan standar pelayanan minimal desa.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

- 1) Pengumpulan data dan informasi untuk mengidentifikasi serta merumuskan masalah mitra;
- 2) Penyusunan laporan proposal pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pembentukan tim dan pembagian kerja;
- 4) Peninjauan lokasi kegiatan dan pertemuan awal dengan kepala desa untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Persiapan materi pengabdian kepada masyarakat; dan
- 6) Persiapan alat dan bahan.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan diawali dengan melakukan penilaian pengetahuan awal peserta (*pre test*), dan dilanjutkan dengan memberikan materi sosialisasi terkait pengaturan di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Adapun muatan materi sosialisasi SPM Desa adalah:

- 1) Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
- 2) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
- 3) Pemberian surat keterangan;
- 4) Penyederhanaan pelayanan; dan
- 5) Pengaduan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis dalam memahami penyusunan alur pelayanan publik di desa, menyusun SOP sebagai standar penerapan SPM di desa Cahaya Negeri. Terakhir dilanjutkan dengan sesi diskusi Tanya jawab.

c. Tahap Evaluasi

- 1) Melakukan penilaian pengetahuan peserta setelah tahap sosialisasi (*post test*);
- 2) Melakukan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 3) Melakukan analisis data mengenai pengetahuan peserta.

d. Tahap Pelaporan

- 1) Menyusun laporan akhir (pembahasan dan kesimpulan) berdasarkan hasil analisis data; dan
- 2) Menyusun artikel untuk publikasi ke jurnal.

Proses analisis data dilakukan dengan program SPSS 22 dengan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat hasil nilai *pre test* dan *post test* peserta. Selanjutnya dilakukan proses interval data untuk mengelompokkan nilai dari masing-masing *pre test* dan *post test* peserta.

Pada hahikatnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, baik penguatan terhadap regulasi maupun teknis pelaksanaan standar pelayanan minimal desa. Adapun perubahan pasca kegiatan yang diharapkan bagi mitra adalah luaran sebagai berikut.

Tabel 1. Luaran PkM bagi mitra

No	Unsur	Pra PkM	Pasca PkM
1	Keterbatasan SDM	Kondisi mitra yang belum memahami akan pentingnya SPM	Meningkatnya pemahaman SDM terkhusus dalam memahami Permendagri No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
3	Belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi digital	Adanya web desa, namun belum efektif dalam mempublikasi aspek layanan yang terhubung dengan penerapan SPM di desa secara efisien	Meningkatnya pemahaman pemerintah desa dalam mengefektifkan media web dan media sosial
4	Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparaturn pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya SPM	Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terkait aturan mengakibatkan lemahnya kesadaran di dalam penerapan standar pelayanan minimal desa	Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya SPM
5	Meningkatkan pelayanan sesuai dengan SPM Desa	Pemerintah desa menghadapi kendala dalam alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan inisiatif peningkatan kualitas layanan. Keterbatasan sumber daya finansial dapat menghambat investasi dalam infrastruktur, pelatihan bagi aparaturn desa, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penerapan SPM.	Terdorongny pemerintah desa untuk melakukan perubahan agar patuh terhadap regulasi dengan menyediakan sumber daya finansial dalam penerapan SPM di desa Cahaya Negeri

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan proses pengumpulan informasi awal, dimana dilakukannya pertemuan antara tim pengabdian dengan kepala desa dan beberapa perangkat desa yang ada di kantor desa Cahaya Negeri. Proses ini perlu dilakukan tim untuk menyusun proposal beserta materi sosialisasi yang pas untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Cahaya Negeri.

Proses identifikasi awal antara tim pengabdian dengan mitra, dilakukan dengan cara berdiskusi dan mencatat hal penting apa yang dialami oleh mitra. Disamping itu, kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman dasar mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Berdasarkan hasil diskusi ini, terungkap bahwa meskipun ada pemahaman dasar mengenai pentingnya SPM Desa, namun kepala desa dan perangkat desa yang ada masih belum menguasai

detail implementasi dan standar yang harus dipenuhi. Melalui proses identifikasi awal ini, tim pengabdian mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan desa, yang akan menjadi dasar dalam merancang program pengabdian kepada masyarakat di Desa Cahaya Negeri.

Adapun pelaksanaan kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, dimana acara dimulai dengan kegiatan seremonial berupa sambutan Kepala Desa Cahaya Negeri sekaligus membuka acara secara resmi, dilanjutkan dengan rangkaian acara pembukaan, dimana secara lengkap rangkaian acara dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cahaya Negeri

No	Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
1	30 menit	Registrasi Peserta registrasi dan membagikan lembar <i>pre test</i> .	Devana Permana dan Pera Andika (Mahasiswa)
2	5 menit	Pembukaan Kepala Desa Cahaya Negeri membuka acara secara resmi, dilanjutkan dengan perkenalan awal ketua tim pengabdian dan menyebutkan materi apa saja yang akan disampaikan.	a. Kepala Desa Cahaya Negeri b. Abdul Aziz Zulkhikim (Ketua Tim)
3	15 menit	<i>Pre test</i> Lembar <i>Pre test</i> yang telah dibagikan di kerjakan oleh peserta, dan pengerjaan selesai tim membantu mengambil lembar peserta, dikumpulkan dan di nilai .	Devana Permana dan Pera Andika (Mahasiswa)
4	120 menit	Materi inti a. Penjelasan materi serta simulasi dalam penyusunan alur pelayanan publik di desa, menyusun SOP sebagai standar penerapan SPM. b. Diskusi Tanya-jawab.	Abdul Aziz Zulkhikim (Ketua Tim)
5	15 menit	<i>Post test</i> Membagikan lembar post test dan peserta mengerjakan.	Devana Permana dan Pera Andika (Mahasiswa)
6	5 menit	Penutup a. Tanya-jawab. b. Menutup acara. c. Pamitan.	Tim Pengabdian

Materi disampaikan dengan menampilkan slide, dimana format ceramah dilakukan untuk membedah pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Walaupun materi ini di khususkan untuk kepala desa dan perangkat desa, namun memberikan wawasan dalam mengikutsertakan masyarakat menjadi penting, dimana menempatkan masyarakat agar terlibat aktif dalam mengawasi pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan amanah Permendesa Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana pada Pasal 94 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif dilakukan oleh masyarakat desa. (Fatkhurohman, 2018) berpendapat bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik di pemerintahan desa tidak dinyatakan secara eksplisit, dan seharusnya dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Maksud dari pernyataan yang disampaikan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa tidak diatur secara eksplisit, namun faktanya hadir Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 yang mengharuskan pemerintah desa untuk menerapkan standar pelayanan minimal desa, yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 1. Suasana saat penyampaian materi ketua tim

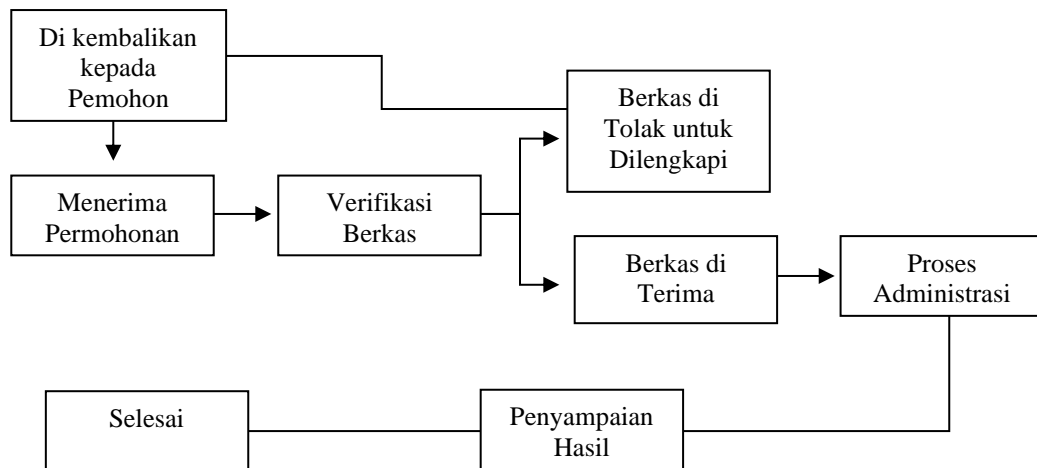
Pada saat materi berlangsung peserta menanyakan terkait bagaimana urgensi dari pelaksanaan SPM Desa, sehingga hal ini dijelaskan bahwa keberlangsungan implementasi SPM Desa, penting untuk membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Mekanisme ini harus mampu memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja implementasi SPM Desa, serta memungkinkan adanya perbaikan yang tepat waktu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kaitannya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Monitoring dan evaluasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di pemerintahan desa, agar menjadi prioritas utama, dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti sumber daya aparatur, kelembagaan, ketidakpastian prosedur operasional standar, masyarakat, dan kewenangan yang kurang optimal mempengaruhi kualitas pelayanan publik (Suharto et al., 2016).

Membangun kesadaran pemerintah desa Cahaya Negeri dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal Desa menjadi penting dengan mengambil langkah-langkah yang terarah dan terukur, diharapkan dalam penerapan SPM Desa dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah desa secara keseluruhan. Dengan adanya sistem yang transparan, efisien, dan partisipatif, desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain penyampaian materi, diberikan pula kepada peserta berupa simulasi dalam penyusunan alur pelayanan publik di desa Cahaya Negeri. Tim dalam hal ini mengajak peserta untuk menjelaskan macam-macam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Cahaya Negeri, selanjutnya tim melakukan skenario alur pelayanan yang dapat diterapkan dan yang terpenting dapat mudah dipahami oleh pemerintah desa dalam menjalankannya secara efektif.

Simulasi diarahkan dengan membedah aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, dimana pemerintah desa Cahaya Negeri nantinya dapat menyusun SOP dengan tahapannya yang dirancang secara rinci, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi data, hingga penyelesaian layanan. SOP ini juga mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Melalui pendekatan partisipatif, tim bersama peserta dapat menyusun alur pelayanan sederhana, dimana hal ini dapat dijelaskan ke dalam bagan pada gambar 3.



Gambar 2. Rancangan alur pelayanan publik di Desa Cahaya Negeri

Setiap langkah di atas digambarkan dalam bagan untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh pihak yang terlibat. Bagan alur dirancang untuk memastikan setiap tahap pelayanan dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan, dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Implementasi alur ini diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa Cahaya Negeri.



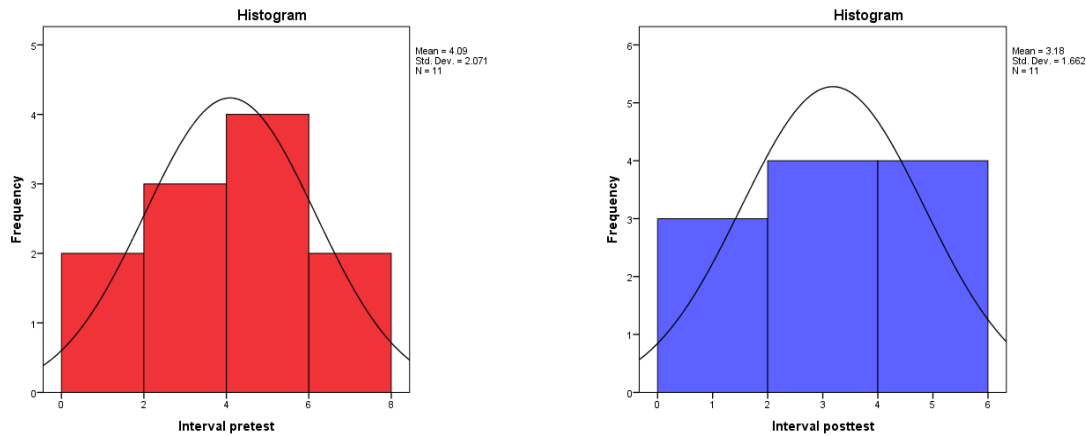
Gambar 3. Peserta antusias dalam memahami alur pelayanan

Untuk mengukur pemahaman peserta, maka tim menyebarkan soal *pre test* untuk menguji kemampuan awal dan *post test* untuk mengevaluasi pemahaman peserta pasca materi selesai disampaikan. Soal dikerjakan oleh 11 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 2 orang kepala urusan, 2 orang kepala seksi, dan 5 orang kepala dusun.

Tabel 3. Analisis deskriptif *frequencies pre test* dan *post test*

Pengetahuan	Data	Mean	Range	Minimum	Maximum
Standar	Pelayanan <i>Pre Test</i>	55.45	30	40	60
Minimal (SPM) Desa	<i>Post Test</i>	70.91	20	70	80

Adapun hasil nilai pre test dan post test peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pengetahuan mereka terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut.



Gambar 4. Hasil *pre test* dan *post test* peserta

Tabel 4. Data interval *pre test* dan *post test* peserta

No	Interval Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
Pre Test			
1	39 – 43	2	18.2
2	44 – 48	0	0
3	49 – 53	3	27.3
4	54 – 58	0	0
5	59 – 63	4	36.4
6	64 – 68	0	0
7	69 - 73	2	18.2
Total		11	100
Post Test			
1	59 – 63	3	27.3
2	64 – 68	0	0
3	69 – 73	4	36.4
4	74 – 78	0	0
5	79 – 83	4	36.4
Total		11	100

Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, bahwa terdapat peningkatan pengetahuan antara sebelum diberikan materi (*pre test*) dengan setelah diberikan materi (*post test*). Namun diketahui pada saat dilakukannya pre test dan post test terjadi beberapa masalah berikut.

- Saat mengisi pre test banyak peserta yang mengisi jawaban dengan cara mencontek dan asal mengisi;
- Jumlah sample uji statistik sangat sedikit, sehingga mengurangi aspek *reliability*;
- Responden tergesa-gesa dalam mengerjakan soal post test.

4. SIMPULAN

Meningkatkan kesadaran pemerintah desa sangat penting untuk mengoptimalkan penerapan standar pelayanan minimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada aparatur desa mengenai pentingnya standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa Cahaya Negeri. Temuan pengabdian mengindikasikan bahwa terdapat kekurangan pengetahuan dan keterampilan di kalangan aparatur desa mengenai standar pelayanan minimal. Melalui kegiatan yang dilakukan, terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman yang baik di kalangan aparatur desa, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di desa Cahaya Negeri. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengawal penerapan standar pelayanan minimal demi tercapainya pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang telah mendukung proses pendanaan kegiatan. Selanjutnya, terima kasih tak terhingga kepada Pemerintah Desa Cahaya Negeri yang telah memberikan akses dan penerimaan kepada tim untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Baru, B. M., Rusbiyanti, S., & Sumiati. (2019). Corruption of Public Bureaucracy, and its Implications on the Quality of Public Services. *Developing Country Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.7176/dcs/9-6-08>
- Djani, W. (2022). Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital). In *1*.
- Fatkhurohman, F. (2018). Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Pemerintah Desa. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/WY.V11I2.745>
- Hasanah, B., & Saruri, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita*.45(2).
- Hidayat, R., Wardani, M., Nursansiwi, D. A., Rosadi, A., & Junaidin, J. (2022). Conscientization on Techniques of the Social Audit towards the Implementation of the Village Development Program. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/ja.v6i1.16731>
- Jing, Y. (2007). Improving the Public Service of Rural is the Key to Construct Harmonious Society. *Journal of Social Work*.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 1–9.
- Sadik, M. (2022). Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Daerah. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55745/jwbp.v3i1.30>
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Suharto, D., Muktiyo, W., & K, S. (2016). Public Service Quality of Village Government In Intergovernmental Relations Perspective. *Intergovernmental Relations Perspective*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/ICPM-16.2016.111>

Surapto, D. (2014). *The Influence of People Satisfaction on Service Organization Public Performance of Village Districts in South of Tangerang*. 13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jmb.v13i2.243>